

**KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT, KALIMANTAN SELATAN,
DAN NUSA TENGGARA BARAT**

Juli Panglima Saragih¹

Abstract

Local government-owned banks (Bank Pembangunan Daerah) have an important role in boosting local economy development. In response with a tighter competition, BPDs are argued to be able to keep on increasing their assets, as well as capital, and better managing their financial performance in order to penetrate local market to become market leaders rather than market followers. This meant that they must be able to run their business thoroughly and share more contributions from the profits they obtained to the local government revenue. This research focuses on analyzing financial performance of BPDs in the provinces of Sumatera Barat, Kalimantan Selatan and Nusa Tenggara Barat. It includes a comparative analysis to reveal those which can fully run its business very well.

Abstrak

Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dengan ketatnya persaingan antar-bank, BPD harus mampu mengelola aset yang dimiliki sebagai modal usaha untuk meningkatkan kinerja keuangannya agar menjadi pemimpin pasar, tidak sebagai pengikut pasar. Dengan pengelolaan usaha yang baik, maka BPD dapat menambah kontribusi dari laba untuk menambah pendapatan daerah. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kinerja keuangan BPD di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Di samping menganalisa perbandingan dari ketiga BPD yang diteliti.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Neraca, Laporan Keuangan, Bank Pembangunan Daerah

¹Penulis adalah Peneliti Madya Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data & Informasi (PPDI), Sekretariat Jenderal DPR RI.
E-mail: juli21panqlima@yahoo.com.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, banyak pemerintah daerah mendirikan Badan Usaha Milik daerah atau BUMD (*local government-owned enterprise*). Perusahaan yang didirikan daerah-daerah memiliki bentuk badan hukum yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan ada pula yang berbentuk perusahaan daerah (PD). Sebelum otonomi daerah diberlakukan, BUMD yang sudah berdiri antara lain perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan daerah pasar (PD Pasar), dan bank pembangunan daerah (BPD). Saat ini ada pemerintah daerah yang mendirikan bank perkreditan rakyat sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, seperti Pemerintah Kota Bandung. Sekarang hampir setiap daerah provinsi mendirikan perusahaan daerah bank pembangunan daerah, yang berbadan hukum perseroan terbatas atau berbentuk perusahaan daerah.

Sejak tahun 1969 undang-undang tentang perusahaan daerah tersebut dicabut oleh pemerintah dan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan penggantinya. Setelah dicabutnya undang-undang tersebut, setiap pembentukan/pendirian BUMD baru oleh pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui setiap peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sampai saat ini, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota kini masih memiliki perusahaan daerah. Tujuan pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah, antara lain untuk menjalankan pelayanan publik—sebagai tanggungjawab pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendirian perusahaan daerah air minum (PDAM). Tujuan lainnya adalah untuk mencari keuntungan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk menambah pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun kinerja BUMD di daerah saat ini berbeda-beda. Ada yang masih mampu memperoleh untung, tetapi ada juga BUMD yang rugi. Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pengelolaan dan kinerja BUMD yang ada hingga tahun 2004, secara keseluruhan mencapai 669 BUMD, dengan total aset sebesar Rp 83,2 triliun. Tetapi persebaran asetnya tidak merata, hanya terkonsentrasi pada bidang usaha tertentu. Dari total nilai aset tersebut,

sebanyak Rp 74 triliun merupakan aset BUMD yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan yang jumlahnya hanya 96 unit usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Itu artinya, 16 persen dari seluruh unit usaha BUMD yang ada menguasai 89 persen aset keseluruhannya. Di sisi lain, BUMD yang bergerak di penyediaan air minum, yaitu PDAM, yang jumlahnya mencapai 348 atau 52 persen, nilai asetnya hanya Rp 7,2 triliun atau sekitar 9 persen saja dari keseluruhan aset. Begitu juga dengan BUMD yang bergerak di bidang usaha lain-lain, seperti pasar, terminal, perindustrian, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan sebagainya, jumlahnya 223 BUMD atau 33 persen.²

BUMD yang bergerak di bidang usaha perbankan dan jasa keuangan sudah bisa mendatangkan keuntungan. Pada tahun 2004, misalnya, keuntungan dari BPD dan BPR milik pemda secara kumulatif sebesar Rp 5,5 triliun. Sedangkan, PDAM justru merugi dengan nilai kumulatif mencapai Rp 1,7 triliun. Di samping rugi, seluruh PDAM juga masih berutang ke pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar, sekitar Rp 6 triliun. Artinya, jika pemerintah pusat tidak memberi keringanan dan semua utang PDAM harus dibayar, seluruh aset mereka akan habis. Sementara itu, sebanyak 223 BUMD yang bergerak di bidang usaha di luar perbankan dan air minum hanya mampu membukukan laba Rp. 561 miliar. Dengan pengelolaan dan kinerja yang amburadul seperti itu, tentu saja tujuan dari dibentuknya BUMD justru semakin jauh. Alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendongkrak penerimaan PAD, justru anggaran dan belanja daerah yang sering digerogeti. Secara nasional, dari tahun 2000 hingga 2002 kontribusi dari laba BUMD kurang dari 1 persen terhadap penerimaan APBD provinsi. Untuk tingkat kabupaten/kota bahkan lebih rendah lagi, cuma 0,3 persen. Sementara itu, terhadap PAD provinsi, kontribusi laba BUMD rata-rata hanya mencapai 2 persen, dan di tingkat kabupaten/kota 2,6 persen.³

BPD Sumatera Barat, BPD Kalimantan Selatan dan BPD Nusa Tenggara Barat merupakan tiga perusahaan daerah yang diteliti dari aspek kinerja keuangannya. Baik buruknya kinerja keuangan suatu bank pembangunan daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dalam APBD. Karena salah satu komponen pendapatan daerah berasal dari bagian laba BUMD.

²Lihat Reformasi dan Revitalisasi BUMD, dalam <http://www.mediaotonomi.com/perskhus.htm>, diakses pada tanggal 5 Januari 2010

³Ibid.

B. Permasalahan Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengkaji kinerja keuangan BPD di ketiga provinsi di atas (BPD Sumatera Barat, BPD Kalimantan Selatan dan BPD Nusa Tenggara Barat), yang berimplikasi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini tidak membahas hubungan atau pengaruh kinerja keuangan ketiga BPD di atas terhadap dengan Pendapatan Asli Daerah dari ketiga provinsi tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pokok penelitian adalah apakah ketiga BPD tersebut mampu meningkatkan kinerja keuangannya dengan memanfaatkan aset, modal dan segala sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan operasional dan laba perusahaan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: 1) untuk menganalisa kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan BPD di Sumatera Barat, BPD di Kalimantan Selatan dan BPD Nusa Tenggara Barat dengan mengkaji rencana dan strategi kebijakan perusahaan BPD yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja BUMD. 2) untuk mencari masukan dari daerah dalam rangka adanya rencana pembahasan draft RUU tentang BUMD yang akan dilakukan oleh DPR RI. Sedangkan kegunaannya adalah sebagai masukan dalam rencana reformasi perusahaan daerah, khususnya bank pembangunan daerah sebagai BUMD.

II. Kerangka Pemikiran

A. *Profitability Ratio* dan *Liquidity Ratio*

Kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisa laporan keuangan dengan menggunakan *Profitability Ratio* dan *Liquidity Ratio*. Dalam teori ini, neraca dan laporan keuangan sangat penting sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan atau kinerja organisasi secara keseluruhan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada

dasarnya ingin mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Analisis laporan keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Apalagi informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah, pemegang saham bank, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Arti penting analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. bagi pihak manajemen: untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, pengembangan karier,
2. bagi pemegang saham: untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan investasi,
3. bagi kreditor: untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang beserta bunganya,
4. bagi pemerintah: pajak, persetujuan untuk *go public*,
5. bagi karyawan: penghasilan yang memadai, kualitas hidup, keamanan kerja.

1. Profitability Ratio (Rentability Ratio)

Yang dimaksud dengan *Profitability Ratio* adalah analisis rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba digubakan informasi neraca dan laporan kuangan atau laporan laba/rugi yang diterbitkan setiap tahun atau suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas ini identik dengan rasio rentabilitas (*rentability ratio*).⁴

*The profitability ratios are the basic bank financial ratios.
Profitability ratios are the financial statement ratios which focus
on how well a business is performing in terms of profit.*⁵

⁴Budi Rahardjo, *Laporan Keuangan Perusahaan*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-2 Januari, 2005., hal. 122-123

⁵http://www.bizwiz.ca/profitability_ratio_calculation_formulas/profitability_ratios.html, diakses tanggal 11 Januari 2010

Konsepsi di atas dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio laporan keuangan yang memfokuskan pada bagaimana kinerja *profit* suatu perusahaan atau usaha bisnis. Rasio profitabilitas ini juga merupakan alat ukur kemampuan keuangan perusahaan atau usaha bisnis dalam mengevaluasi kemampuannya menghasilkan keuntungan setelah dikurangi berbagai pengeluaran atau biaya dalam suatu periode tertentu.

Apabila suatu perusahaan atau usaha bisnis dapat memperoleh laba lebih besar atau sama dengan perolehan laba periode sebelumnya, maka usaha perusahaan tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari *Gross Profit Margin* atau *Marjin Laba Kotor*.

Sedangkan *Return on Equity (ROE)* adalah variabel laba atau rugi setelah pajak dibagi dengan ekuitas (modal) dalam jangka waktu tertentu. Rasio profitabilitas lain adalah *Return on Asset (ROA)*.

*Return on Assets is to tell how the assets of the firm are used most effectively to earn profit. The mathematical formula for return on assets is: -Return on Assets = (Net Income / Total Assets). Return on Assets ratio provides a standard for evaluating how efficiently financial management employs the average dollar invested in the firm's assets, whether the dollar came from investors or creditors.*⁶

Dari konsep/definisi di atas dapat dikatakan, ROA merupakan salah satu rasio atau indikator untuk mengukur perbandingan antara aset dengan laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun buku). Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar nilai ROA. Artinya jumlah aset yang dikelola mampu menghasilkan laba yang diperoleh. Untuk memperkuat konsepsi di atas, kita dapat menyimak kutipan sebagai berikut:

*Return on Assets (ROA) shows the after tax earnings of assets and is an indicator of how profitable a company is. Return on assets ratio is the key indicator of the profitability of a company. It matches net profits after taxes with the assets used to earn such profits. A high percentage rate will tell you the company is well run and has a healthy return on assets. This ratio is calculated using the following formula: Net Profit After Taxes ÷ Total Assets.*⁷

⁶<http://finance.mapsofworld.com/corporate-finance/concepts/profitability-ratios.html>, diakses tanggal 13 Januari 2010

⁷http://kbr.dnb.com/help/Ratios/Profitability_Ratios.htm, diakses tanggal 13 Januari 2010

2. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratios*)

Yang dimaksud dengan rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, dalam jangka pendek atau satu tahun terhitung sejak tanggal Neraca perusahaan (*balance of sheet*) dibuat.⁸ Kewajiban atau hutang jangka panjang yang ada dalam neraca dapat dipenuhi atau ditutup dari aktiva lancar yang juga berputar dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan data neraca perusahaan.⁹

Ada beberapa formula rasio likuiditas yakni: rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio cepat adalah perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar (*current liability*).¹⁰ Pengertian ini sama dengan definisi rasio likuiditas yang dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

The Liquidity Ratios are the basic bank financial ratios. Liquidity ratios are the financial statement ratios which measure the ability of a business to meet its short term financial obligations on time.

Formula Liquidity Ratio is Current Asset / Current Liability.¹¹

Neraca dan laporan rugi atau laba merupakan salah satu alat untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Informasi dari laporan keuangan dan neraca tersebut, mempunyai arti yang penting bagi pihak yang berkepentingan. Bagi BPD sebagai suatu usaha yang bergerak di sektor perbankan, analisis laporan keuangan merupakan proses yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari analisis kredit. Hal ini disebabkan karena analisis laporan keuangan mempunyai tujuan agar resiko dalam pemberian kredit seperti adanya ketidakpastian di masa mendatang dapat diperkecil. Sehingga tujuan pemberian kredit dapat tercapai baik dari segi keamanan, yaitu kredit yang telah diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan dari segi profitabilitas yaitu kredit yang diberikan dapat memberikan keuntungan bagi kreditur berupa bunga.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini bisa dikatakan sampai seberapa efektif seluruh manajemen dalam menghasilkan

⁸ Budi Rahardjo, *op cit.*, hal., 120-121

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ http://www.bizwiz.ca/liquidity_ratio_calculation_formulas/liquidity_ratios.html, diakses pada tanggal 15 Januari 2010

laba untuk perusahaan. Baiknya *Profit Margin* (PM) dan *Return on Equity* (ROE) menunjukkan adanya kinerja perusahaan yang efektif dalam menghasilkan laba karena nilai rasionya lebih besar daripada rata-rata industri sejenis.

Sedangkan kinerja perusahaan dalam mengelola aset adalah buruk jika ROA memperlihatkan nilai rasio yang lebih kecil dibandingkan rata-rata industri sejenis. Hal ini menunjukkan ketidakefisiensian dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba secara proporsional meskipun nilai PM dan nilai ROE memperlihatkan hasil yang baik dibandingkan dengan rata-rata industri.

Analisis laporan keuangan suatu perusahaan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan manajemen perusahaan. Sebagai suatu organisasi, kegiatan usaha perusahaan harus dapat mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, termasuk bagaimana manajemen mengelola modal untuk mendapatkan laba. Pengelolaan modal perusahaan guna memperoleh laba merupakan salah satu fungsi dari manajemen keuangan dalam perusahaan.

Sedangkan pengertian manajemen keuangan (*financial management*) adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dan menggunakan dana, serta mengelola aset serta modal (*equity*) sesuai dengan tujuan perusahaan mencari keuntungan (*profit*) dan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Fungsi utama manajemen keuangan adalah: 1) *Investment Decision*: yakni keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan; 2) *Financing Decision*, yakni keputusan yang berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik (struktur modal yang optimal); 3) *Assets Management Decision*: yakni keputusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva.¹²

III. Metodologi

A. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptis-analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisa data primer dari hasil wawancara di lapangan, serta menganalisa data sekunder dan informasi yang relevan lainnya dalam kaitan dengan kinerja keuangan perusahaan daerah BPD provinsi Sumatera Barat, BPD Kalimantan Selatan dan BPD Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan laba.

¹²Lihat James C. Van Horne, & John M. Machowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 1*, Edisi 12, Penerbit Salemba Empat (2005), Jakarta, Bab 1. "Peran Manajemen Keuangan", hal. 5

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci (pejabat dan staf karyawan) pada BPD Sumatera Barat, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD Kalimantan Selatan. Informan lainnya adalah: Bappeda dan Biro Perekonomian di Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian di atas dilakukan pada tanggal 27 April-3 Mei 2009 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10-17 Juli 2009 di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tanggal 2-9 Oktober 2009 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan pemilihan ketiga provinsi tersebut yakni untuk menggambarkan studi kasus yang dilihat dengan dasar perbedaan karakteristik letak geografis dari ketiga BPD tersebut, yaitu wilayah barat Indonesia, wilayah tengah Indonesia dan wilayah timur Indonesia, serta perbedaan perkembangan ekonomi di ketiga daerah tersebut.

IV. Pembahasan

A. Kinerja Keuangan BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

Sampai saat ini data dari Bank Indonesia mencatat bahwa jumlah bank pembangunan daerah (BPD) sebanyak 26 BPD, diantaranya adalah BPD Sumatera Barat, BPD Kalimantan Selatan dan BPD NTB. BPD merupakan bank milik pemerintah daerah yang sahamnya dimiliki bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan modal disetor sebesar Rp. 400 juta.¹³⁾ Bentuk badan hukum

¹³Hasil wawancara dengan pejabat Divisi Perencanaan dan Strategi Bank Nagari pada tanggal 29-30 April 2009 di Kantor BPD Sumbang. Modal disetor setiap tahun berubah. Pada tahun 2007 lalu modal disetor berjumlah Rp.335,552 milyar. Lihat Laporan Tahunan Bank 2007. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) secara resmi sebagai perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No.W3-00074HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007.

perusahaan saat ini adalah perseroan terbatas (PT). Sebelumnya status hukum perusahaan adalah berbentuk perusahaan daerah (PD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.¹⁴

Visi perusahaan adalah menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Misi perusahaan adalah: 1). memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2). memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melalui Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.15 Tahun 1992 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 584.23-407 tanggal 23 Maret 1993, penyertaan modal dari pihak ketiga dapat dilakukan sekurang-kurangnya 51% modal disetor (penyertaan modal dari Pemerintah Daerah tingkat I dan II).¹⁵ Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 1996, dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.50 miliar menjadi Rp.150 miliar.

Dalam usaha memperluas jaringan kerja dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui keikutsertaannya dalam kegiatan aktivitas perbankan internasional terutama dalam bidang ekspor dan impor, sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/20/KEP.DpG/2007 tanggal 11 Oktober 2007, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diberikan izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.¹⁶ Berdasarkan penjelasan dari Biro Perekonomian Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Sarana Perekonomian, bahwa pada awal berdirinya, status Bank Nagari berbentuk Perseroan Terbatas BPD Sumatera Barat. Tetapi dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1962, status BPD Sumbar menjadi perusahaan daerah (PD). Sejak tahun 2007, status BPD Sumbar kembali menjadi berbentuk perseroan terbatas (PT).¹⁷

¹⁴ Ibid

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ris Hendri dari Divisi Perencanaan dan Strategi serta Bapak Yus Rizal dari Divisi Bisnis Bank Nagari pada tanggal 28-29 April 2009 di kantor BPD Sumbar, Kota Padang. (Perda tentang BPD Sumatera Barat yang sudah dikeluarkan adalah Perda Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1992, Perda Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 1996, dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk badan Hukum BPD Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Sarana Perekonomian Biro Perekonomian Sumbar, Ibu Zaimar, SE,M.Sc., pada tanggal 31 April 2009 di kantor Gubernur Sumbar.

Total aset bank pada akhir tahun 2008 berjumlah Rp. 6,81 triliun, meningkat Rp 407,14 miliar atau 6,36% dari posisi akhir tahun 2007. Artinya peranan total aset Bank dalam total aset perbankan di Sumatera Barat meningkat dari 30,64% pada tahun 2007 menjadi 31,43%, pada tahun 2008. Total aktiva produktif pada akhir tahun 2008 berjumlah Rp. 6,39 triliun, meningkat Rp. 783,94 miliar atau 13,97% dari posisi akhir tahun 2007. Perkembangan yang demikian antara lain didorong oleh peningkatan posisi kredit dan aktiva antar bank dalam jumlah yang cukup berarti disamping beralihnya sebagian dana yang selama ini tertahan dalam Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai *idle money* ke dalam aktiva produktif sesuai kebijakan likuiditas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia.¹⁸

TABEL 1
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BANK NAGARI, SUMBAR
PER AKHIR TAHUN 2008

No.	Pemerintah Prov./Kab./Kota	(Rupiah)	Porsi (%)
1	Pem. Propinsi Sumatera Barat	143.520.000.000	39,01%
2	Pem. Kota Padang	17.539.000.000	4,77%
3	Pem. Kota Bukittinggi	4.481.000.000	1,22%
4	Pem. Kota Payakumbuh	13.790.000.000	3,75%
5	Pem. Kota Solok	10.988.000.000	2,99%
6	Pem. Kota Sawahlunto	12.138.000.000	3,30%
7	Pem. Kota Padang Panjang	7.021.000.000	1,91%
8	Pem. Kota Pariaman	7.798.000.000	2,12%
9	Pem. Kab. 50 Kota	6.844.000.000	1,86%
10	Pem. Kab. Agam	11.362.000.000	3,09%
11	Pem. Kab. Tanah Datar	39.797.000.000	10,82%
12	Pem. Kab. Pesisir Selatan	3.827.000.000	1,04%
13	Pem. Kab. Padang Pariaman	8.408.000.000	2,29%
14	Pem. Kab. Solok	11.184.000.000	3,04%
15	Pem. Kab. Sawahlunto/Sijunjung	15.566.000.000	4,23%
16	Pem. Kab. Pasaman	9.222.000.000	2,50%
17	Pem. Kab. Mentawai	36.145.000.000	9,83%
18	Pem. Kab. Pasaman Barat	824.000.000	0,22%
19	Pem. Kab. Solok Selatan	2.197.000.000	0,60%
20	Pem. Kab. Dharmasraya	1.098.000.000	0,30%
21	Koperasi Karyawan PT. BPD Sumatera Barat	4.119.000.000	1,12%
	Total	367.868.000.000	100%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Nagari Tahun 2008

¹⁸ Ibid

Kewajiban bank terhadap pemerintah, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, bank lain, nasabah dan lain-lain pada akhir tahun 2008 berjumlah Rp 6,09 triliun, meningkat Rp 326,23 miliar atau (5,66%) dari tahun sebelumnya. Total ekuitas bank sampai dengan akhir tahun 2008 berjumlah Rp 724,76 miliar, meningkat Rp 80,91 miliar atau 12,57% dari posisi tahun 2007. Selain peningkatan laba bersih yang meningkat, peningkatan ekuitas tersebut juga dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2007 dan 2008.¹⁹

Selama tahun 2008, bank memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 564,46 miliar, meningkat Rp. 104,91 miliar atau 22,83% dari perolehan pendapatan bunga bersih selama tahun 2007. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut antara lain dicapai sebagai hasil kebijakan pendanaan yang ditempuh selama tahun 2008 yaitu mengurangi porsi deposito berbiaya mahal dalam struktur dana bank, sehingga total biaya dana selama tahun 2008 menjadi lebih rendah sebesar Rp 34,79 miliar atau minus 9,97% dan tahun sebelumnya. Dengan perkembangan yang demikian, diperoleh *Net Interest Margin (NIM)* akhir tahun 2008 sebesar 9,11%, meningkat 1,39% dari tahun 2007.²⁰

Selama tahun 2008, bank juga memperoleh pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 26,91 miliar, meningkat Rp 5,63 miliar atau 26,44% dari jumlah pendapatan operasional lainnya selama tahun 2007. Pendapatan operasional lainnya tersebut sebagian besar bersumber dari empat pos pendapatan, yaitu provisi dan komisi selain kredit, penggantian ongkos administrasi, penggantian biaya telepon dan telegram, pendapatan administrasi *Automatic Teller Machine (ATM)*. Peningkatan pendapatan operasional lainnya yang relatif tinggi selama tahun 2008 terutama didorong oleh peningkatan yang cukup tinggi pada pos pendapatan provisi dan komisi selain kredit (49,13%), penggantian ongkos administrasi (29,06%), pendapatan administrasi ATM (28,21%) dan penggantian biaya telepon dan telegram (17,94%).²¹

Sedangkan beban operasional lainnya dipergunakan untuk beban umum dan administrasi, beban personalia dan beban lainnya. Selama tahun 2008 bank mengeluarkan beban operasional lainnya sebesar Rp. 347,68 miliar, meningkat Rp. 63,43 miliar atau 22,31% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

didorong oleh penambahan beban umum dan administrasi sebesar Rp. 6,62 miliar atau 8,35%, beban personalia Rp. 45,15 miliar atau 27,48% dan beban lainnya sebesar Rp. 11,66 miliar atau 28,70%. Pada umumnya pengeluaran beban umum dan administrasi selama tahun 2008 telah dapat dikendalikan. ²²

Laba operasional sebesar Rp 221,48 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp. 35,04 miliar atau 18,79% dari laba operasional yang diperoleh selama tahun 2007. Dalam tahun 2008 bank memperoleh pendapatan non-operasional bersih sebesar Rp. 1,16 miliar, jauh lebih baik dari kondisi pada tahun 2007 yang menanggung beban non-operasional bersih sebesar Rp. 0,59 miliar. Perkembangan yang demikian dicapai karena adanya peningkatan pendapatan non-operasional selama tahun 2008 sebesar Rp. 1,26 miliar yang diimbangi dengan penurunan beban non-operasional sebesar Rp. 0,49 miliar. ²³

Pada tahun 2008 bank memperoleh peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp. 36,79 miliar atau 19,79% dari laba sebelum pajak tahun 2007, sehingga posisinya pada akhir tahun 2008 telah mencapai Rp. 222,64 miliar. Dengan perkembangan yang demikian maka ROA yang dihasilkan bank meningkat dari 2,76% pada tahun 2007 menjadi 3,24% pada tahun 2008. Tahun 2008, bank memperoleh peningkatan laba bersih sebesar Rp. 25,81 miliar atau 20,11% dari tahun lalu, sehingga posisinya pada akhir tahun 2008 telah mencapai Rp 154,19 miliar. ²⁴

Dengan perkembangan yang demikian maka ROE yang dihasilkan bank meningkat dari 24,47% pada tahun 2007 menjadi 24,88% pada tahun 2008. Dengan adanya penambahan saham sebanyak 160.162 lembar, maka laba bersih per saham pada tahun 2008 mencapai Rp. 419.000/saham. Dengan demikian maka *dividen yield* pada tahun 2008 mencapai 24,87% atau mencapai sekitar 2,7 kali dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 1 bulan rata-rata sepanjang tahun 2008. ²⁵

Dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2009 dapat dikatakan bahwa prospek usaha tahun 2009 dalam skala nominal mengalami peningkatan, namun laju peningkatannya melambat dari tahun sebelumnya. Demikian pula beberapa indikator kinerja keuangan juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut total aset direncanakan tumbuh sekitar 13,69% atau Rp. 912,62 miliar sehingga posisinya pada tahun 2009 mencapai Rp. 7,72 triliun.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *ibid*

Posisi kredit direncanakan tumbuh sekitar 17,46% atau Rp 868,46 miliar sehingga posisinya pada tahun 2009 mencapai Rp .5,84 triliun. Rasio *Non Performing Loan* pada tahun 2009 mencapai 3,74%, sedikit meningkat dibandingkan 3,66% pada tahun 2008. Posisi dana simpanan direncanakan bertumbuh sekitar 15,00% atau Rp 802,30 miliar sehingga posisinya pada tahun 2009 mencapai Rp. 6,15 triliun. Laba setelah pajak pada tahun 2009 mencapai Rp 163,77 miliar, atau meningkat 6,21% dibanding Rp 154,19 miliar pada tahun 2008.

Sedangkan nilai CAR dalam rencana bisnis bank pada tahun 2009 mencapai 14,92% setelah memperkirakan risiko operasional. Namun dengan adanya perubahan ketentuan Bank Indonesia tentang penundaan ketentuan penerapan risiko operasional, maka CAR pada tahun 2009 jauh lebih tinggi dari angka perkiraan tersebut. Nilai LDR pada tahun 2009 mencapai 95,00%, dibanding 93,01% pada tahun 2008. Nilai ROA pada tahun 2009 mencapai 3,20% dibanding 3,24% pada tahun 2008. Nilai ROE pada tahun 2009 mencapai 22,26% dibanding 24,88% pada tahun 2008. Ratio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada tahun 2009 mencapai 79,18%, meningkat dibanding sebesar 75,54% pada tahun 2008.²⁶

TABEL 2
IKHTISAR KEUANGAN BPD SUMBAR
(2004-2008, DALAM RIBU RUPIAH)

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
Aset	3,098,387,117	3,478,846,679	5,455,413,988	6,403,553,067	6,810,696,863
Aktiva Produktif	2,836,209,234	3,180,152,857	4,943,402,327	5,610,191,270	6,394,128,452
Kredit	1,948,249,738	2,390,149,653	2,983,906,913	4,012,896,062	4,975,381,484
Dana Masyarakat	2,056,897,948	2,493,309,599	4,306,785,164	5,301,170,675	5,349,113,945
Kewajiban	2,750,459,095	3,031,171,111	4,902,531,815	5,759,705,724	6,085,935,425
Modal Disetor	143,594,469	143,594,469	143,594,469	335,552,000	367,868,000
Ekuitas	347,928,022	447,675,568	552,882,173	643,847,342	724,761,438
Pendapatan Bunga	409,213,473	457,431,090	675,871,605	808,307,044	876,367,526
Beban Bunga	157,359,110	163,403,070	290,159,602	348,761,576	313,706,848
Laba Seb. Pajak	134,998,591	140,686,750	155,062,019	185,852,662	222,642,240
Laba Ses. Pajak	92,965,552	97,150,634	107,107,663	128,380,284	154,191,912

Sumber: Laporan Keuangan Bank Nagari Tahun 2008

²⁶ Ibid

TABEL 3
PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN BANK NAGARI, SUMBAR
(2004 - 2008)

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
ROA	4.46%	4.20%	3.18%	2.76%	3.24%
ROE	27.72%	24.23%	23.93%	24.88%	38.28%
CAR	15.84%	17.28%	23.37%	20.39%	18.73%
LDR	94.72%	95.86%	69.28%	75.70%	93.01%
NPL	3.44%	4.38%	3.70%	4.00%	3.66%
BOPO	67.23%	72.08%	77.08%	77.53%	75.54%

Sumber : Laporan Keuangan Bank Nagari Tahun 2008²⁷

B. Kinerja Keuangan BPD Kalimantan Selatan

BPD Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 berdasarkan Perda Tingkat I Kalimantan Selatan yakni Perda Nomor 4 Tahun 1954. Ijin operasional atau ijin usaha BPD Kalimantan Selatan diperoleh dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia dengan surat keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Pembentukan BPD ini didasarkan atas diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Pada awal berdiri, modal disetor berjumlah Rp. 100 juta. Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, modal BPD Kalimantan Selatan bertambah menjadi Rp. 500 milyar. Jabatan Direktur Utama saat ini dipegang oleh H. Juni Rifat dan dibantu oleh 3 (tiga) orang direktur lainnya. Sampai saat ini BPD Kalsel masih berbentuk perusahaan daerah (PD).²⁸

Dari modal tersebut, jumlah uang yang sudah disetor oleh BPD (2008) adalah Rp. 205, 82 milyar dengan rincian sebagai berikut:

²⁷ LDR singkatan dari *Loan to Deposit Ratio*. Artinya perbandingan antara dana pihak ketiga dengan pinjaman yang diberikan. NPL singkatan dari *Non-Performing Loan*. Artinya pinjaman yang memiliki tingkat kamacetan dalam pengembalian yang tinggi oleh debitur. BOPO singkatan dari beban operasional & pendapatan operasional

²⁸ Hasil wawancara dengan Staf Divisi Umum BPD Kalimantan Selatan tanggal 4 Oktober 2009 di kantor BPD Kalsel. Staf Divisi Umum tersebut menjelaskan bahwa dalam Laporan Tahunan BPD Kalimantan Selatan Tahun 2008, bahwa landasan hukum pendirian BPD Kalimantan Selatan adalah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003. Dalam Perda tersebut diatur kembali modal dasar menjadi 150.000.000.000 rupiah.

TABEL 4
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BPD KALIMANTAN SELATAN

No.	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Rupiah	Porsi (%)
1	Pemda Provinsi	Rp.87,136 milyar	(42,34%)
2	Pemkot Banjarmasin	Rp.27,800 milyar	(13,51%)
3	Pemkab Kotabaru	Rp.13,187 milyar	(6,41%)
4	Pemkab Hulu Sungai Tengah	Rp.12 milyar	(5,83%)
5	Pemkab Hulu Sungai Utara	Rp.11,264 milyar	(5,47%)
6	Pemkab Hulu Sungai Selatan	Rp.10,509 milyar	(5,11%)
7	Pemkab Tanah Laut	Rp.10,374 milyar	(5,04%)
8	Pemkab Tabalong	Rp.9,902 milyar	(4,81%)
9	Pemkab Tapin	Rp.5,242 milyar	(2,55%)
10	Pemkab Balangan	Rp.4,898 milyar	(2,38%)
11	Pemkot Banjarbaru	Rp.4,383 milyar	(2,13%)
12	Pemkab Barito Kuala	Rp.3,809 milyar	(1,85%)
13	Pemkab Banjar	Rp.3,320 milyar	(1,61%)
14	Pemkab Tanah Bumbu	Rp.2 milyar	(0,97%)

Sumber: Laporan tahunan BPD Kalimantan Selatan, 2007 dan 2008

Visi perusahaan adalah menjadi '*Banknya Urang Banua*' yang dipercaya dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sedangkan misi perusahaan adalah menjadikan BPD Kalimantan Selatan sebagai bank sehat yang berperan meningkatkan partisipasi dalam perekonomian dan pembangunan daerah serta pengembangan UMKM melalui penyaluran kredit/pembiayaan dan pemenuhan jasa keuangan/perbankan lainnya, serta memperoleh laba yang optimal.

Tujuan pendirian BPD Kalimantan Selatan adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah.²⁹

Dalam hal status BPD Kalsel yang masih berbentuk perusahaan daerah (PD), pihak Bappeda dan Biro Perekonomian mengharapkan bahwa status perusahaan daerah BPD seyogyanya tidak menghambat manajemen BPD untuk melakukan operasional bisnis perbankan untuk mencari laba. Yang penting bagaimana manajemen BPD Kalsel dapat memberikan kontribusi bagi

²⁹ Lihat lebih lanjut Laporan Tahunan BPD Kalimantan Selatan 2008, hal.7

perekonomian Kalsel dan PAD bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang saham.³⁰

Manajemen BPD Kalimantan Selatan telah menetapkan beberapa sasaran yang hendak dicapai mulai tahun 2008,³¹ yakni: memelihara rasio tingkat kesehatan bank selalu berada pada peringkat pertama atau kedua, meningkatkan dana pihak ketiga dengan tingkat pertumbuhan yang telah ditargetkan, penyaluran kredit tumbuh lebih besar dari target tahun sebelumnya, mengembangkan kegiatan operasional, mengembangkan jaringan kantor dan peningkatan kerjasama dengan pihak lainnya, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, mengadakan sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan gedung kantor yang lebih representatif guna kelancaran aktivitas kerja dan pemberian pelayanan yang lebih baik dan nyaman kepada nasabah, mengembangkan manajemen resiko secara bertahap dengan memperhatikan kepada kebutuhan dan kemampuan kompleksitas usaha yang dijalankan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia serta merujuk pada *Basel Accord II*, mengoptimalkan peran BPD sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan yang berperan dalam pembangunan daerah dan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Produk-produk kredit BPD Kalimantan Selatan antara lain: kredit modal kerja, kredit investasi, kredit modal kerja konstruksi, kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah (KPR), *cash collateral credit*, kredit BPD peduli, kredit ketahanan pangan dan energi, kredit mikro ekonomi produktif (KMEP), pinjaman haji, pinjaman pemda, kredit sindikasi dan kredit talangan gaji. Sedangkan produk jasa bank adalah: kiriman uang, inkaso, garansi bank, ATM bank, *debit card*, *safe deposit box*, dan beberapa *payment point*.³²

Total aset BPD Kalimantan Selatan sampai tahun 2008 berjumlah Rp 3,68 triliun. Pertumbuhan selama 4 tahun terakhir (2005-2008) rata-rata setiap tahun 26,37%. Dana pihak ketiga (2008) berjumlah Rp.3,246 triliun dimana giro merupakan komponen terbesar (60%). Jumlah kredit yang disalurkan oleh BPD sampai akhir 2008 berjumlah Rp.1,757 triliun. Rasio antara pinjaman dengan dana yang dihimpun (2008) 54,08% meningkat dari tahun 2006 dan 2007. Nilai NPL yang diperoleh bank adalah sebesar 1,29% (2008). Sedangkan angka NPL BPD tahun-tahun sebelumnya relatif besar, mislanya tahun 2005 mencapai 2,88%

³⁰ Hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kalsel dan Biro Perekonomian Kalsel tanggal 5-6 Oktober 2009 di Kantor Gubernur Kalsel.

³¹Lihat Laporan Tahunan 2007, *op.cit.*, hal. 21

³² *Ibid*

dan 2006 NPLnya sebesar 2,88%.³³ Perkembangan kinerja keuangan BPD Kalimantan Selatan dijelaskan dalam tabel di bawah.

Salah satu cara melihat kinerja keuangan atau kinerja usaha suatu bank adalah laba yang diperoleh. Laba operasional BPD tahun 2007 berjumlah Rp 92,860 milyar dan laba operasional tahun 2008 berjumlah Rp.118,956 milyar. Laba bersih (laba setelah pajak penghasilan) pada tahun 2007 sebesar 63,097 milyar dan pada tahun 2008 berjumlah Rp 81,458 milyar atau meningkat sebesar 23%. BPD Kalimantan Selatan pada tahun 2007 memperoleh penghargaan predikat "Sangat Bagus" dari Majalah Infobank untuk kinerja tahun buku 2007. Manajemen bank juga telah 3 (tiga) kali memperoleh penghargaan *Platinum Award*. Dengan demikian selama 12 (duabelas) tahun berturut-turut BPD Kalimantan Selatan mampu mempertahankan prestasi tersebut.³⁴

TABEL 5
IKHTISAR/KINERJA KEUANGAN BDP KALIMANTAN SELATAN
(2004-2008, JUTA RUPIAH)

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
Aset	1.283.749	1.924.696	3.102.950	3.364.813	3.682.437
Modal	139.134	153.378	232.128	284.270	369.867
Pendapatan	137.308	185.590	322.208	362.740	431.391
Biaya	99.000	143.565	233.820	270.116	313.259
Laba bersih (<i>net profit</i>)	25.899	27.868	58.386	63.097	81.457
Rasio Keuangan (%)					
1.CAR	22,49%	20,45%	23,98%	21,29%	16,49%
2.NPL (<i>gross</i>)	2,55%	2,88%	2,88%	2,19%	1,29%
3.ROA	3,78%	2,78%	3,25%	2,57%	1,70%
4.ROE	22,21%	18,87%	34,43%	27,54%	27,71%
5.NIM	13,80%	10,10%	8,28%	6,34%	-
6.LDR	47,80%	38,49%	29,92%	35,50%	54,08%

Sumber: Laporan Tahunan BPD Kalimantan Selatan Tahun 2007 dan 2008

C. Kinerja Keuangan BPD Nusa Tenggara Barat

Atas kuasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I

³³ Ibid

³⁴ Ibid.

Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 telah menetapkan berdirinya Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 60 juta. Landasan operasionalnya adalah ijin usaha Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Nomor 45/63/MUBS/6 tanggal 20 Nopember 1963.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat telah meresmikan mulai beroperasinya BPD NTB pada tanggal 5 Juli 1964, yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BPD NTB. Perubahan-perubahan selanjutnya terhadap Perda Nomor 6 Tahun 1963 tentang BPD NTB yang menyangkut besarnya modal dasar adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah No.9 tahun 1979 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 750 juta. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1981 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp 2 milyar. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1984 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp 6 milyar. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1990 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp 10 milyar. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp 25 milyar.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur antara lain mengenai pemilikan dan bentuk hukum pendirian bank, maka BPD NTB telah mengadakan perubahan bentuk hukum pendiriannya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, Modal dasar BPD NTB ditetapkan sebesar Rp.100 milyar.

Proses perubahan bentuk hukum BPD NTB menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 4 Pebruari 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD NTB dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan telah diundangkan dalam lembaran daerah Propinsi daerah tingkat I NTB Nomor.5 Seri-D No.2 tanggal 21 April 1999, Keputusan Menteri dalam Negeri No.584.62.241 tanggal 19 Maret 1999 tentang pengesahan peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I NTB No.7 Tahun 1999.

Akte Pendirian yang dibuat oleh Samsaimun,SH Notaris pengganti dari Abdullah, SH tanggal 30 April 1999 Nomor 22. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C-8225-HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38

tanggal 11 Mei 1999. Sampai tahun 1998, status hukum BPD adalah perusahaan daerah (PD). Baru pada tahun 1999, status hukum Perusahaan Daerah BPD NTB berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD NTB berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tersebut.³⁵ Jumlah keseluruhan direksi BPD NTB sebanyak 4 orang direktur, terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Kepatuhan dan Direktur Pemasaran. Jabatan Direktur Utama per tanggal 31 Desember 2008 dipegang oleh H. Rachiman.³⁶

Modal dasar BPD NTB adalah modal disetor oleh pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota. Tahun 2006 modal dasar BPD NTB adalah berjumlah Rp. 250 milyar. Dari modal dasar tersebut jumlah dana yang sudah disetor oleh seluruh pemerintah daerah NTB sampai akhir tahun 2008 adalah sebesar Rp. 179,292 milyar. Adapun struktur kepemilikan saham dari BPD NTB masing-masing pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 6
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BPD NUSA TENGGARA BARAT

No.	Pemerintah Prov/Kab./Kota	Porsi (%)
1	Pemda Provinsi NTB	(44,71%)
2	Pemkot Mataram	(3,08%)
3	Pemkot Bima	(0,64%)
4	Pemkab Lombok Barat	(5,32%)
5	Pemkab Lombok Tengah	(4,85%)
6	Pemkab Lombok Timur	(10,73%)
7	Pemkab Sumbawa	(8,05%)
8	Pemkab Bima	(3,80%)
9	Pemkab Dompu	(15,73%)
10	Pemkab Sumbawa Barat	(3,09%)
	Total	100%

Sumber: Laporan Tahunan BPD NTB 2008.³⁷

³⁵ Wawancara dengan jajaran staf Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan Bank NTB pada tanggal 12 Juli 2009 di Kantor BPD NTB di . Lihat juga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Status Hukum Perusahaan Daerah BPD NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT). BPD NTB, pada tanggal 21 April 1999.

³⁶ Wawancara dengan Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12 Juli 2009. Lihat juga Laporan Tahunan BPD Nusa Tenggara Barat, Tahun 2008, halaman 55.

³⁷*Ibid*, hal. 19

Produk Bank NTB saat ini antara lain adalah Kredit Serba Guna (KSG), Kredit Usaha Mikro Ekonomi Produktif, Kredit Peningkatan Kesejahteraan PNS, Kredit Investasi dan Modal Kerja, Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Kredit Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri, KFW-SME, KPKM, KUMK-SUP-005 dan Kredit Proaktif. Sedangkan layanan jasa perbankan adalah Bank Garansi Penawaran, Uang Muka, Palaksanaan, dan Pemeliharaan, Jasa Transfer dan Inkaso.³⁸

BPD Kalimantan Selatan telah menetapkan strategi usaha yang dilakukan pada tahun 2009 antara lain, yaitu: meningkatkan tingkat kesehatan bank pada peringkat 'sehat' dengan nilai komposit 2, menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang berdasarkan profil resiko bank, melaksanakan *good corporate governance* (GCG) secara konsisten, meningkatkan kinerja manajemen dengan fokus pada proses dan pencapaian target serta sasaran rencana bisnis bank, memelihara kecukupan modal bank sesuai dengan ketentuan, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas bank, mengoptimalkan pengelolaan likuiditas sesuai profil sumber dana.

Guna memastikan tersedianya likuiditas yang cukup maka BPD NTB perlu peningkatan *earning* akses dana, meningkatkan mobilitas dana masyarakat, menetapkan struktur kredit yang mengara pada ekspansi kredit yang aman, memperbesar pangsa pasar, dan memberikan margin yang optimal, mendorong peningkatan *fee based income*, melanjutkan kebijakan kerjasama dengan lembaga keuangan dan antar-bank baik bidang *funding* maupun *lending*, meningkatkan dan mempertahankan kualitas aktiva produktif, khususnya kredit untuk mendorong peningkatan profitabilitas bank, meningkatkan kualitas SDM berbasis kompetensi, integritas, loyalitas dan dedikasi, mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas dan daya saing bank, mengembangkan infrastruktur sesuai kebutuhan dan skala prioritas organisasi.

Kekuatan permodalan statu bank tercermin pada pencapaian rasio CAR yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Pada akhir Desember 2008, posisi rasio CAR sebesar 14,18%. Nilai CAR minimum ketentuan Bank Indonesia adalah 8%. Performa kemampuan Bank NTB dalam perannya sebagai lembaga intermediasi tercermin dari tingkat rasio LDR. Sedangkan Posisi LDR tahun 2007 adalah 109,31% dan tahun 2008 sebesar 128,48%. *Non Performing Loan* pada tahun 2008 sebesar 0,4% turun dari tahun 2007 sebesar 1,31%. Ini artinya

³⁸Ibid, hal.16-17

jumlah kredit yang kurang lancar BPD NTB cenderung semakin kecil dibandingkan dengan total kredit serta dibandingkan dengan tahun sebelumnya BPD NTB tahun 2007 memperoleh laba operasional sebesar Rp.57,709 milyar. Laba sebelum pajak penghasilan (*earning before tax/EBT*) adalah Rp. 64,404 milyar. Dan laba setelah pajak penghasilan adalah Rp.40,674 milyar. Tahun 2008 laba bersih perusahaan meningkat menjadi Rp. 61,460 milyar. Laba operasional (2008) Rp. 90,454 milyar, dan laba sebelum pajak (2008) adalah Rp. 92,366 milyar. Laba bersih tahun 2008 tersebut meningkat sebesar 34% dari tahun 2007..³⁹

Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif posisi akhir Desember 2008 sebesar 3,63%. Sedangkan kinerja pengelolaan aktiva (*rentability*) diukur dengan rasio *Return on Asset (ROA)*. ROA tahun 2007 mencapai 2,12% sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi 4,53%. Sedangkan kualitas pengelolaan modal yang diukur dengan *Return on Equity (ROE)* pada tahun 2008 sebesar 26,98% meningkat dari tahun 2007 sebesar 16,36%.

TABEL 7
RASIO-RASIO KEUANGAN BPD NUSA TENGGARA BARAT
(POSISI 31 DESEMBER 2004-31 DESEMBER 2006)

Keterangan	2004	2005	2006
<i>Net Non Performing Loan (Net NPL)</i>	0.29%	0.63%	0.53%
ROA	4.73%	3.76%	2.27%
ROE	25.89%	23.81%	18.22%
NIM	15.57%	12.34%	11.98%
BOPO	74.77%	77.71%	82.57%
LDR	94.65%	101.43%	87.68%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB 2004, 2005, dan 2006.

³⁹Lihat Laporan Tahunan BPD NTB, 2008, hal.4

TABEL 8
NERACA DAN LAPORAN LABA/RUGI BPD NUSA TENGGARA BARAT
(DALAM RUPIAH)

Keterangan	2007	2008
Kas (<i>cash money</i>)	46.819.728.984	44.783.335.025
Total Aset (<i>total of asset</i>)	1.922.790.890.441	1.874.586.185.095
Kewajiban (<i>liabilities</i>)	1.674.210.396.409	1.590.289.447.988
Ekuitas (<i>equity</i>)	248.580.494.032	284.296.737.107
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.922.790.890.441	1.874.586.185.095
Pendapatan Bunga Bersih	181.176.362.350	219.964.298.257
Laba Operasional (<i>operating income</i>)	57.709.541.209	90.454.199.352
Laba bersih (<i>net income after tax</i>)	40.674.419.430	61460.193.075
Laba bersih per saham dasar	3.613	2.599

Sumber: Laporan Tahunan BPD NTB Tahun 2008.

Adapun perbandingan kinerja keuangan bank pembangunan daerah di ketiga provinsi tersebut antara lain adalah perkembangan perolehan laba, ROA, ROE, CAR dan LDR (perbandingan antara jumlah pinjaman atau kredit yang diberikan dengan deposito). CAR singkatan dari *Capital Adequacy Ratio*. Artinya adalah rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bahwa bank-bank di Indonesia wajib mempertahankan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%. Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor 7/10/DNPN tanggal 31 Maret 2005. CAR Perbankan Kurang dari 8% Harus Ditutup. Bank Indonesia (BI) harus menutup operasional bank jika rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) perbankan kurang dari ketentuan BI yaitu di level delapan persen. Hal tersebut hanya akan menyebabkan perbankan kesulitan likuiditas dan menyebabkan masalah.⁴⁰

Secara singkat perbandingan kinerja keuangan ketiga bank pembangunan daerah di ketiga provinsi tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah.

⁴⁰<http://economy.okezone.com/read/2010/01/04/320/290796/320/car-perbankan-kurang-dari-8-harus-ditutup>, diakses tanggal 25 September 2010.

TABEL 9
PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK NAGARI, BPD
KALIMANTAN SELATAN DAN BPD NUSA TENGGARA BARAT
(PER 31 DESEMBER 2008)

BPD	LDR (%)	ROA (%)	ROE (%)	NPL/NPF (%)	CAR(%) ⁴¹
Bank Nagari	89,29	3,15	24,88	1,59	17,16
BPD Kal. Selatan	43,94	3,10	27,71	1,29	16,49
BPD NTB	109,58	14,18	26,98	2,69	14,18

Sumber: Diolah dari Berbagai Laporan Keuangan Bank Nagari, BPD Kalimantan Selatan dan BPD NTB, Tahun 2008. Majalah *INFOBANK* Nomor 359, Februari 2009. CAR diatas sudah memperhitungkan resiko pasar dan resiko kredit yang disalurkan.

TABEL 10
PERBANDINGAN ASET, MODAL DISETOR, UTANG/KEWAJIBAN, DAN
LABA USAHA (NET PROFIT) BPD SUMATERA BARAT, BPD KALIMANTAN
SELATAN, BPD NTB
(PER 31 DESEMBER 2008, MILYAR RUPIAH)

BPD	Asset	Modal Disetor	Utang/Kewajiban	Laba Bersih
Bank Nagari	6.810,695	692,506	6,085,935	151,191
BPD Kal. Selatan	3.682,436	205,823	3.312,569	81,458
BPD NTB	1.874,586	179,291	1.590,289	61,460

Sumber: Laporan Keuangan Bank Nagari, BPD Kalimantan Selatan dan BPD NTB, Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa, perbandingan laba yang diperoleh dengan jumlah aset (ROA), menunjukkan bahwa ROA BPD Nusa Tenggara Barat lebih baik dari Bank Nagari dan BPD Kalimantan Selatan walaupun jumlah aset BPD NTB lebih kecil dibandingkan dengan Bank Nagari dan BPD Kalimantan Selatan. Demikian juga dengan rasio kecukupan modal atau CAR BPD NTB yang lebih rendah dibandingkan BPD Sumatera Barat dan BPD Kalimantan Selatan tahun buku 2008. Namun jumlah aset Bank Nagari lebih besar dibandingkan dengan BPD Kalimantan Selatan dan BPD NTB. CAR rata-rata seluruh BPD tahun per Desember 2008 berjumlah 16,82%.⁴²

Dari 26 jumlah BPD yang ada saat ini, BPD yang beraset diatas Rp.10 Triliun antara lain adalah: Bank DKI, Bank Jabar dan Banten, BPD Aceh, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Jateng, & Bank Riau. Bank Jatim atau BPD Jatim merupakan BPD yang memiliki aset terbesar tahun 2008 yakni berjumlah Rp.16,248 triliun.⁴³

BPD NTB adalah termasuk salah satu BPD yang mempunyai aset relatif kecil diantara BPD lainnya. BPD lain yang beraset kecil adalah BPD Jambi Rp. 1,555 triliun dan BPD Bengkulu dengan jumlah aset Rp.1,696 triliun pada tahun 2008.⁴⁴

Apabila dikaji dari jumlah laba, maka laba Bank Nagari jauh lebih besar dibandingkan dengan BPD Kalimantan Selatan dan BPD NTB. Hal ini menunjukkan semakin baik kinerja keuangan perusahaan Bank Nagari yakni dengan peningkatan laba bersih yang diperoleh setiap tahun. (Lihat tabel 6).

Ditinjau dari aspek rasio likuiditas (perbandingan jumlah aset dengan jumlah utang lancar/kewajiban lancar), maka rasio likuiditas ketiga bank tersebut di atas pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: Bank Nagari (112%), BPD Kalimantan Selatan (111%), dan BPD NTB (118%). Dari rasio likuiditas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga bank memiliki tingkat kemampuan likuiditas yang relatif baik. Rata-rata berada di atas 100%. Semakin sedikit jumlah utang atau kewajiban, maka semakin baik kinerja keuangan suatu bank. Sedangkan dari rasio *net interest margin* (NIM) dapat dijelaskan bahwa NIM Bank Nagari (tahun 2008) berjumlah 9,21%; NIM BPD Kalimantan Selatan berjumlah 7,69%; dan nilai NIM BPD NTB berjumlah 11,54%. Bandingkan dengan *Net Interest Margin* rata-rata seluruh BPD di Indonesia per Desember 2008 adalah sebesar 8,52%.

⁴² Majalah *InfoBank*, Nomor 368, bulan November 2009

⁴³ Majalah *InfoBank*, Nomor 360, bulan Maret 2009.

⁴⁴ Majalah *InfoBank*, Nomor 363, buni 2009

Perkembangan kinerja keuangan BPD Kalsel tidak terlepas dari status hukum dari perusahaan saat ini. Dari hasil wawancara dengan pihak BPD Kalsel diperoleh informasi bahwa status hukum BPD Kalsel adalah masih berbentuk perusahaan daerah. Berbeda dengan status hukum dari BPD Sumbar dan BPD NTB yang sudah berbentuk perseroan terbatas atau PT.

Status hukum BPD Kalsel yang masih berbentuk perusahaan daerah sedikit banyak mempengaruhi dinamika dan perkembangan kinerja bank secara keseluruhan, termasuk soal pengembangan investasi dan modal usaha. Kebijakan mengembangkan BPD Kalsel bergantung kepada keputusan dari para pemegang saham yakni Gubernur, Bupati dan Walikota di Kalsel. Dalam nilai ROA (tingkat perolehan pendapatan dari pengelolaan aset), misalnya, masih lebih rendah dibandingkan dengan ROA dari BPD NTB. Perolehan marjin bunga dari BPD Kalsel (2008) juga masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata BPD di Indonesia. Sedangkan perolehan marjin bunga BPD NTB lebih besar daripada BPD Kalsel, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Sedangkan nilai aset BPD Sumbar sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan aset BPD NTB dan aset BPD Kalsel. Hal ini juga menunjukkan peroleh laba dari BPD Sumbar juga jauh lebih besar daripada BPD NTB dan BPD Kalsel.

V. Penutup

Secara umum kinerja keuangan dari ketiga bank pembangunan daerah tersebut adalah baik yang dapat dilihat dari perolehan laba pada tahun buku 2008 serta peningkatan nilai aset yang dimiliki oleh ketiga BPD. Dari ketiga BPD tersebut, laba Bank Nagari adalah tertinggi di antara ketiga BPD yang diteliti. BPD Sumbar juga memiliki jumlah aset yang paling besar. Perbandingan antara perolehan laba dengan jumlah aset (ROA) yang dimiliki menunjukkan bahwa BPD Nusa Tenggara Barat relatif lebih baik dibandingkan dengan BPD Sumbar dan BPD Kalimantan Selatan.

Dari sisi CAR, bahwa nilai CAR ketiga BPD relatif aman di bawah 20%. Ketiga BPD tersebut sampai Desember tahun 2008 telah mampu memenuhi ketentuan CAR dari Bank Indonesia yakni minimal 8%. Rasio kecukupan modal ini sangat penting bagi setiap bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menyimpan dana nasabah dan di sisi lain menyalurkan kredit untuk menunjang kegiatan usaha debitur atau perekonomian. Sebagai gambaran CAR rata-rata seluruh BPD adalah sebesar 16,82% pada tahun 2008. Nilai CAR ini juga masih dibawah 20%.

Apabila dilihat dari aspek pertumbuhan aset bank, maka pertumbuhan aset ketiga BPD tersebut positif, namun disimpulkan bahwa BPD NTB termasuk BPD yang jumlah asetnya sangat kecil jauh dibandingkan dengan aset Bank Nagari tahun 2008. Semakin besar aset suatu bank (aktiva) semakin baik kinerja usahanya. Artinya kemampuan untuk mendatangkan laba perusahaan akan semakin meningkat setiap tahun. Kelebihan Bank Nagari dibandingkan dengan BPD Kalimantan Selatan dan BPD NTB adalah bahwa Bank Nagari sejak tahun 2007 telah secara resmi sebagai bank devisa. Bank pembangunan daerah lain yang sudah berstatus sebagai bank devisa adalah BPD Jateng, BPD Bali dan BPD Jabar Banten. Ini artinya Bank Nagari telah ikut serta dalam upaya mendorong kegiatan di sektor perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di Indonesia. Kelebihan lain adalah bahwa Bank Nagari telah mempunyai cabang di luar Sumatera Barat, yakni di Provinsi Riau dan Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di sektor perbankan BPD hanyalah salah satu bentuk dari tipe atau jenis bank. Akibat semakin banyaknya jumlah bank di Indonesia dan di daerah/provinsi, maka persaingan antara bank pembangunan daerah dengan bank-bank lain cukup ketat. Apalagi ada bank besar yang memiliki aset diatas 10 triliun rupiah beroperasi di suatu daerah/provinsi di mana ada bank pembangunan daerah.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai pemilik bank pembangunan daerah sangat berkepentingan atas kelangsungan operasional bank dalam mendapatkan laba. Semakin besar bank pembangunan daerah memperoleh laba, maka semakin besar jumlah bagian laba yang disumbangkan kepada pendapatan asli daerah dalam APBD. Sebaliknya apabila bank pembangunan daerah di ketiga daerah tersebut rugi—dalam laporan keuangannya, maka tidak ada kontribusi bagi pendapatan asli daerah dalam APBD.

Beberapa saran atau rekomendasi penulis yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan kinerja keuangan ketiga BPD di atas antara lain adalah: *pertama*, ketiga BPD di atas perlu secara terus-menerus (setiap tahun) menambah jumlah aset (aktiva) dan modal disetor atau modal sendiri. Semakin besar jumlah aset dan modal sendiri dari ketiga BPD maka cenderung semakin besar peluang untuk memperoleh laba (pendapatan). *Kedua*, sebagai badan usaha yang bergerak di sektor perbankan, maka ketiga BPD perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan bank secara umum sebagai yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

10 Tahun 1998. *Ketiga*, sebaiknya BPD Kalsel melakukan perubahan bentuk hukum perusahaan dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.

Di samping itu, BPD sebagai salah satu tipe bank, juga wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (PBI), seperti: Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan CAR; dan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta Giro Wajib Minimum Bank Umum. *Keempat*, ketiga BPD perlu memiliki segmen pasar sendiri sebagai karakteristik BPD di daerah. Penetapan segmen pasar sendiri (*market niche*), merupakan peluang untuk memperbesar peran bank dalam menggerakkan perekonomian di daerah masing-masing. Bank pembangunan daerah sebaiknya menghindari persaingan sebagai pengikut pasar (*market follower*) di lingkungan industrinya, karena sulit dalam penguasaan pasar secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budi Rahardjo, *Laporan Keuangan Perusahaan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-2 Januari, 2005.

Harmono, *Manajemen Keuangan*, Penerbit Bumi Aksara, 2009, Jakarta

James C. Van Horne, & John M. Machowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 1*, Edisi 12, Penulis, Penerbit Salemba Empat (2005), Jakarta

Oxford English Dictionary, Tenth Edition 2005, Oxford University Press Inc., New York, USA

Majalah:

Majalah *InfoBank*, Nomor 360, Maret 2009.

Majalah *InfoBank*, Nomor 363, Juni 2009

Majalah *InfoBank*, Nomor 368, November 2009

Laporan Tahunan BPD Kalimantan Selatan, 2007 & 2008

Laporan Tahunan Bank Nagari Sumatera Barat, 2008

Laporan Tahunan BPD Nusa Tenggara Barat, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyebutan BPD Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Internet (Karya non-Individual):

http://www.bizwiz.ca/profitability_ratio_calculation_formulas/profit_margin_ratio.html.

http://www.bizwiz.ca/liquidity_ratio_calculation_formulas/liquidity_ratios.html

http://www.bizwiz.ca/profitability_ratio_calculation_formulas/profitability_ratios.html.

<http://finance.mapsofworld.com/corporate-finance/concepts/profitability-ratios.html>.

http://kbr.dnb.com/help/Ratios/Profitability_Ratios.htm

<http://www.asbanda.com/bpd.php?id=15>

<http://economy.okezone.com/read/2010/01/04/320/290796/320/car-perbankan-kurang-dari-8-harus-ditutup>